

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Ketidakseimbangan pendapatan asli daerah terhadap terhadap dana perimbangan khususnya dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat.
- b) Rencana anggaran belanja lebih besar dari pada pendapatan
- c) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.
- d) Defisit anggaran akan berdampak pada pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan, belanja daerah terhadap pendapatan daerah dan dampak Silpa terhadap belanja modal.

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka di sarankan:

- a. Pemerintah Kota Kupang harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan asli daerah, khususnya pajak di bidang perdagangan di NTT, jika maksimal maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.
- b. Perlunya melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam

memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Dan seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, agar kedepannya bisa tumbuh menjadi Kota Kupang yang mandiri dan mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Dengan mengurangi penerimaan pegawai tetap agar biaya belanja untuk pegawai bisa berkurang dan digunakan untuk pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aanisah, Kusnidar. 2010. **Analisis Penyebab Dan Dampak Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.**
- Agustina, Endah. 2008. **Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Defisit Anggaran Terhadap Investasi Di Indonesia (1986-2008).**
- Efendi, Bakhtiar. 2009. **Defisit Anggaran Pemerintah dan Investasi Swasta di Indonesia.** Jurnal Fakultas Ekonomi USU. Medan.
- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2010, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Unit Pembantu Pelayanan STIM YKPN, Yogyakarta.
- Khoirul, Anwar. 2010. **Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Indonesia.**
- Mardiasmo. 2004, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.** Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Leksi J. Moleong, 2010: Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi. (hal.157)
- Nurlan Darise. 2009, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Edisi 2, PT. Indeks Jakarta.
- Sunarno Siswanto, 2014, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zico Wibowo. 2010. Penelitian Terdahulu. **Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Penurunan Investasi Swasta (Crowding out) dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1981-2007.**
- <https://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengertian-definisi-anggaran-defisit/>.
- , Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- , Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 tahun 2015 Tentang Batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan Belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan Dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif Pinjaman daerah tahun anggaran 2016.
- , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2014 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015.
- , Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013 Tentang Batas Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.
- , Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012 Tentang Batas Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.